



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEJO WIHARDIYONO**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **199576**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.494.526.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/48 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2068 m²/54 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 64.526.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/180 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Bangunan Seluas 20 m² di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
5. Tanah Seluas 344 m² di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m²/80 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.895.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 592.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. MOBIL, BMW 320D Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 432.012.304**F. HARTA LAINNYA** Rp. 475.000.000



Sub Total	Rp.	5.113.538.304
III. HUTANG	Rp.	990.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.123.538.304

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.